



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA SUMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HJ. KIKAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 453050

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	856.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/36 m2 di CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah Seluas 327 m2 di CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 46.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/220 m2 di KOTA TASIKMALAYA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 350.000.000		
4. Tanah Seluas 2027 m2 di TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
5. Tanah Seluas 1200 m2 di TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	335.000.000
1. MOBIL, TOYOTA NOAH 2.0/1/T Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
2. MOBIL, HONDA HONDA MOBILIO 004 1.5 E MT CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.191.000.000
III. HUTANG	Rp.	410.679.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	780.320.200



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui , serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.